

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Komunikasi merupakan proses pertukaran pesan atau pun informasi, yang disampaikan dari individu, kelompok, maupun media kepada pihak lain (Soyomukti, 2010, dalam Rismawaty et al., 2014:11). Jika kehadiran komunikasi tidak pernah terjadi, kemajuan di masa sekarang tidak mungkin dapat dirasakan oleh manusia, tidak mungkin sebuah hubungan ada tanpa interaksi diantara manusia satu dengan lainnya. Komunikasi yang terjalin antar manusia tersebut yang menjadi fakta bahwa manusia memiliki kebutuhan untuk bertukar pesan dan informasi dalam berinteraksi.

Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan menyampaikan pendapat, pesan, saran, gagasan, imbauan, keterangan, permohonan, usulan hingga perintah. Pada saat kondisi diatas terjadi berarti secara langsung individu, kelompok, masyarakat atau khalayak umum telah sepakat, komunikasi digunakan sebagai alat untuk menyatukan sebuah persepsi menjadi pemahaman yang telah disepakati bersama-sama. Persepsi yang disepakati bersama dalam kehidupan manusia dipengaruhi oleh beberapa aspek atau bidang.

Berbagai aspek atau bidang tersebut, baik itu bidang ekonomi, politik, budaya maupun sosial memerlukan proses pertukaran pesan maupun informasi karena aspek-aspek tersebut berperan besar dalam membentuk persepsi individu, kelompok, atau pun masyarakat secara efektif, terutama dalam kekuatan pendapat atau suara untuk mendukung kepentingan bidang tertentu. Misalnya dalam sebuah

pandangan politik, sebuah bentuk kekuatan dari struktur komunikasi dapat dilihat sedemikian penting untuk menciptakan praktik koordinasi politik dari suatu negara, yang hasilnya dapat menarik perhatian sehingga menjadi sebuah kesepakatan baik bahkan hingga isu buruk yang akan banyak diperbincangkan dan dapat ditandai menjadi sesuatu yang penting dalam berkomunikasi. (Soyomukti, 2010:11-12).

Komunikasi yang berlangsung akan menjadi penting ketika individu yang satu dengan yang lain saling berinteraksi dan memberi respon untuk merencanakan upaya dan kerja sama mencapai tujuan yang jelas yang dapat disebut sebagai organisasi. Proses komunikasi yang berlangsung saat organisasi berjalan, terdiri dari berbagai rangkaian suatu keterkaitan yang diatur melalui struktur dan dapat dilihat besar fungsi dan perannya melalui kewenangannya yang kemudian akan mempengaruhi hasil yang diciptakan melalui kerja sama antar bidang di dalam organisasi tersebut. Komunikasi yang berlangsung di dalam sebuah organisasi adalah interaksi yang terjadi berlangsung secara terus-menerus guna mendorong keberhasilan tujuan organisasi.

Untuk mencapai tujuan organisasi, komunikasi organisasi berperan penting sebagai sebuah sistem yang bergerak atau hidup, memproses kegiatan yang dilakukan untuk dapat mempertahankan keberadaan organisasi dan menjalankan fungsinya secara struktural dalam mencapai tujuan dengan adanya kegiatan pertukaran pesan maupun informasi. Mengelola sebuah informasi saja tidak cukup, sangat penting untuk dapat memahami bagaimana informasi tersebut diperoleh dan dimanfaatkan dengan baik, itulah yang diharapkan terjadi dalam sebuah organisasi. Organisasi diciptakan melalui komunikasi dan bagian-bagiannya dibuat tersusun

secara struktural, adanya batasan serta fungsi tiap-tiap bagian dapat dibedakan jelas dan nyata (Morrisan, 2013:383). Sistem yang tersusun jelas dengan adanya sumber daya manusia, membuat interaksi dijaga berdasarkan fungsinya dapat mencapai tujuan, sehingga organisasi dapat dipandang sebagai suatu wadah yang dibentuk oleh kerja sama setiap bagiannya yang memiliki kesadaran tinggi tentang perilaku kerja dan penyampaian pesan yang baik sesuai dengan kewajiban dan hak mereka yang dapat disampaikan melalui pesan verbal dan nonverbal secara berulang atau terus-menerus di dalam lingkup organisasi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau biasa disebut juga DP3A Kota Bandung adalah organisasi pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dinas ini berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dinas ini diharuskan untuk dapat menjalankan Peraturan Wali Kota. Dinas ini memiliki tugas penting pada empat bidang khusus yaitu: (1) Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP); (2) Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga (PKK); (3) Bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA); (4) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (P2A). Setiap bidangnya memiliki tugas yang sudah diatur sesuai ranah dan pelaksanaannya masing-masing, disesuaikan dengan Peraturan Wali Kota yang sudah ditetapkan pada masing-masing bidang (Peraturan Walikota Nomor 56, 2022:6, SOTK DP3A).

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertanggungjawab dalam bidang kewirausahaan dan penurunan angka kekerasan

terhadap anak dan perempuan adalah dua dari tiga arahan presiden dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2020-2024. Jokowi menyampaikan pandangannya dan instruksinya mengenai masalah kasus kekerasan pada anak di Indonesia kepada pemerintah daerah yaitu: (1) Jajarannya dapat memprioritaskan aksi pencegahan yang melibatkan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat; (2) Menyiapkan sistem pelaporan dan pelayanan pengaduan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak; (3) Melakukan reformasi besar-besaran agar bisa dilakukan dengan cepat, terintegrasi dan komprehensif. Berkaitan dengan pernyataan tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada pelaksanaan kegiatan pembinaan dapat mempengaruhi implementasi pelaksanaan program Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan di 151 kelurahan di Kota Bandung menjadi aktif beroperasi seluruhnya (Tribun News, 9 Januari 2020).

Dilihat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 2008, menyatakan tentang “Tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang” tugas pokok pembentukan pelayanan terpadu sudah ada sebelum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdiri yaitu tahun 2017. Artinya tugas pokok ini sudah lama menjadi tanggung jawab dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat namun dinas ini tidak melakukan pembentukan pelayanan terpadu yang dapat dijangkau cepat oleh masyarakat karena berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana membawahi dua urusan yaitu urusan wajib dan non pelayanan dasar dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat mencari fokus kepada kegiatan sosialisasi dan humas mengenai pemberdayaan dan keluarga berencana.

Setelah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdiri tahun 2017 tugas pokok mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 2008 dan nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana daerah Perlindungan Perempuan dan Anak beralih menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bukan DP3AKB Provinsi Jawa Barat lagi. Ditambah dengan Peraturan Wali Kota nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan di Kelurahan, yang harus direalisasikan dari tahun 2020 hingga akhir 2024. Tugas pokok ini dipegang khusus pelaksanaannya oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak oleh Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (Website Resmi DP3AKB, 2020).

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab khususnya Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sesuai dengan tiga instruksi Jokowi dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2020-2024 antara lain, adalah Pemberdayaan Perempuan dalam bidang kewirausahaan dan Penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Kota Bandung telah membuat

kebijakan yang tertuang dalam janji wali kota sebagai program prioritas pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 untuk mendirikan Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan di Kelurahan atau yang disingkat dengan nama Puspel PP, di 151 Kelurahan. Puspel PP ini berguna sebagai posko-posko kecil untuk mendekatkan pelayanan yang terkait pemberdayaan dan perlindungan perempuan, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat yang tersebar di 151 Kelurahan dengan melibatkan peran aktif dari masyarakat sebagai para pengurus organisasi secara resmi (Peraturan Walikota, Nomor 56, 2022:17, STOK DP3A).

**Tabel 1. 1**  
**Indikator Pencapaian Pembentukan Puspel PP Aktif dari Tahun 2020-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Indikator Pencapaian</b>	<b>Jumlah Puspel PP Kelurahan Terbentuk</b>	<b>Jumlah Puspel PP Kelurahan Aktif</b>
2020	Sosialisasi Program	-	-
2021	5	5	5
2022	40	40	35
2023	70	110	70

*Sumber: Laporan Puspel PP, Februari 2022*

Pada Tabel 1.1 di atas ini diketahui bahwa Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan Kelurahan atau Puspel PP sudah mulai disosialisasikan di tahun 2020. Indikator pencapaian ini dilihat dari terbentuknya kelurahan yang melebihi dari target ditahun tersebut tapi belum seluruhnya aktif beroperasi. Jumlah Puspel PP yang terbentuk ditargetkan ditahun itu juga dapat beroperasi aktif menjalankan program. Tercapainya indikator pembentukan Puspel PP tersebut dilakukan dengan upaya pelaksanaan kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kegiatan

pembinaan ini dilakukan untuk melatih kapasitas para pengurus Puspel PP untuk dapat melaksanakan program dengan efektif dan menambah jumlah angka Puspel PP aktif sampai dengan tahun 2024.

Mengacu pada hasil wawancara terdahulu peneliti dengan Kepala Sub Koordinator Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A), Firdaini, menyatakan:

“Jadi ini inti pertanyaannya pengawasan Puspel PP bagaimana ya dan tugas DP3A mungkin, jadi tugas DP3A terhadap Puspel PP ada dua, terkait pembinaan/*monitoring* dan evaluasi, terkait keberadaan Puspel PP di Kota Bandung. Pembinaannya seperti apa, pembinaannya kita rutin mengadakan pelatihan walaupun hanya setahun sekali misalnya tapi *insyaallah* dirutinkan setiap tahun mereka mendapatkan peningkatan kapasitas berupa pelatihan. *Nah* terkait *monetnya* (monetisasi/hasil) kita sudah membuat grup wa dan *link* untuk pelaporan Puspel PP jadi mereka harus mengirimkan rencana kerjanya melalui link Puspel PP terus menginput laporan tahunan dan bulannya juga ke link Puspel PP, itu secara *online*. *Nah* kalau secara *offlinenya* biasanya kita membuat jadwal untuk turun ke Kelurahan dan Kecamatan seperti itu” (Wawancara dengan Kepala Sub Koordinator Perlindungan Perempuan dan Anak, Firdaini, 28 Maret 2023).

Kegiatan Pembinaan adalah implementasi dari Aliran Informasi dalam organisasi. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan Kelurahan mendapat pembinaan melalui materi dari pusat dan pihak mitra kerja sama yang sudah disediakan yang akan dapat mempengaruhi keaktifan Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan Kelurahan.

Aliran informasi dalam organisasi merupakan salah satu proses penguatan sistem manajemen yang sangat berpengaruh dalam sebuah organisasi. Aliran informasi suatu keharusan yang perlu dijaga dan dirancang dalam sebuah organisasi untuk membina dan mengembangkan organisasi yang teguh dan terkontrol secara

baik (R. Wayne & Faules, 2015:170-200). Hal yang penting mengenai aliran informasi dalam organisasi yaitu, (1) Komunikasi Ke Atas (Bawah ke atas); (2) Komunikasi Ke Bawah (Atas ke bawah); (3) Komunikasi Horizontal (sederajat); (4) Komunikasi Diagonal (Lintas-saluran); (5) Komunikasi Informal (pribadi/selentingan). Kelima Aliran informasi ini terdapat dalam pelaksanaan Kegiatan Pembinaan yang terimplementasikan dengan kerja sama yang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lakukan beberapa waktu ditahun sebelumnya dan akan terus dilakukan selama periode yang sudah ditentukan. Aliran informasi dalam organisasi tersebut akan terjadi saat Kegiatan Pembinaan Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan Kelurahan Kota Bandung dilaksanakan.

Mengacu pada hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sub Koordinator, Bidang Perlindungan Perempuan (DP3A), Firdaini, menyatakan:

“Kita ada beberapa instansi yang diajak kerja sama, terutama untuk narasumber pelatihan. Karna untuk narasumber itu kan kita membutuhkan narasumber yang ahli terkait masalah kekerasan, pencegahan dan penanganan kekerasan. Disitu kita bekerja sama dengan UPTDPPA, PPA Polrestabes, ada juga dari perguruan tingginya diwakili oleh UNPAD terus dari Lembaga Swastanya dari Lembaga Perlindungan Anak” (Wawancara dengan Kepala Sub Koordinator Perlindungan Perempuan dan Anak, Firdaini, 28 Maret 2023).

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat melihat salah satunya aliran informasi yaitu komunikasi diagonal. Menurut Sumual, Tampi dan Plangtien, komunikasi diagonal adalah komunikasi yang terjadi antar bagian yang bergerak pada ranah dan tempat yang berbeda namun diantara kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama (Sumual, Tampi dan Plangiten, dalam Banjarnahor et al., 2022:95). Komunikasi diagonal pada kegiatan pembinaan tersebut akan dilakukan oleh mitra kerja sama yaitu UPTDPPA, PPA Polrestabes, Lembaga Perlindungan



Anak, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Peran Instansi ini adalah menyampaikan materi pembinaan terkait dengan program pencegahan, penanganan dan pemberdayaan perempuan di masyarakat terutama di kelurahan dan sekaligus menjadi mitra kerja untuk melaksanakan berjalannya program oleh pengurus Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan Kelurahan Kota Bandung tersebut.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengupayakan aliran informasi dalam organisasi pada kegiatan pembinaan yang akan dilaksanakan untuk mempengaruhi efektivitas program Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan Kelurahan. Berdasarkan uraian di atas, peneliti menentukan rumusan masalah yaitu **“Sejauhmana Pengaruh Aliran Informasi pada Kegiatan Pembinaan terhadap Efektivitas Program Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan di Kota Bandung?”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, diperoleh beberapa identifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Sejauhmana **Komunikasi Ke Bawah (Atasan ke bawahan)** pada Kegiatan Pembinaan terhadap Efektivitas Program Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan di Kota Bandung?
2. Sejauhmana **Komunikasi Ke Atas (Bawahan ke atasan)** pada Kegiatan Pembinaan terhadap Efektivitas Program Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan di Kota Bandung?

3. Sejauhmana **Komunikasi Diagonal (Lintas-saluran)** pada Kegiatan Pembinaan terhadap Efektivitas Program Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan di Kota Bandung?
4. Sejauhmana **Komunikasi Horizontal (Sederajat)** pada Kegiatan Pembinaan terhadap Efektivitas Program Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan di Kota Bandung?
5. Sejauhmana **Komunikasi Informal (Pribadi)** pada Kegiatan Pembinaan terhadap Efektivitas Program Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan di Kota Bandung?
6. Sejauhmana Aliran Informasi pada Kegiatan Pembinaan terhadap **Pemahaman Program** Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan di Kota Bandung?
7. Sejauhmana Aliran Informasi pada Kegiatan Pembinaan terhadap **Tepat Sasaran** Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan di Kota Bandung?
8. Sejauhmana Aliran Informasi pada Kegiatan Pembinaan terhadap **Tepat Waktu** Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan di Kota Bandung?
9. Sejauhmana Aliran Informasi pada Kegiatan Pembinaan terhadap **Tercapainya Tujuan** Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan di Kota Bandung?
10. Sejauhmana Aliran Informasi pada Kegiatan Pembinaan terhadap **Perubahan Nyata** Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan di Kota Bandung?

11. Seauhmana **Aliran Informasi** pada Kegiatan Pembinaan terhadap **Efektivitas Program** Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan di Kota Bandung?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menguraikan dan menganalisis tentang Pengaruh Aliran Informasi pada Kegiatan Pembinaan terhadap Efektivitas Program Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan di Kota Bandung.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan tujuan, agar identifikasi dapat diselesaikan sesuai dengan uraian berikut ini:

1. Untuk Mengetahui **Komunikasi Ke Bawah (Atasan ke bawahan)** pada Kegiatan Pembinaan terhadap Efektivitas Program Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan di Kota Bandung.
2. Untuk Mengetahui **Komunikasi Ke Atas (Bawahan ke atasan)** pada Kegiatan Pembinaan terhadap Efektivitas Program Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan di Kota Bandung.
3. Untuk Mengetahui **Komunikasi Diagonal (Lintas-saluran)** pada Kegiatan Pembinaan terhadap Efektivitas Program Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan di Kota Bandung.

4. Untuk Mengetahui **Komunikasi Horizontal (Sederajat)** pada Kegiatan Pembinaan terhadap Efektivitas Program Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan di Kota Bandung.
5. Untuk Mengetahui **Komunikasi Informal (Pribadi)** pada Kegiatan Pembinaan terhadap Efektivitas Program Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan di Kota Bandung.
6. Untuk Mengetahui Aliran Informasi pada Kegiatan Pembinaan terhadap **Pemahaman Program** Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan di Kota Bandung.
7. Untuk Mengetahui Aliran Informasi pada Kegiatan Pembinaan terhadap **Tepat Sasaran** Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan di Kota Bandung.
8. Untuk Mengetahui Aliran Informasi pada Kegiatan Pembinaan terhadap **Tepat Waktu** Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan di Kota Bandung.
9. Untuk Mengetahui Aliran Informasi pada Kegiatan Pembinaan terhadap **Tercapainya Tujuan** Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan di Kota Bandung.
10. Untuk Mengetahui Aliran Informasi pada Kegiatan Pembinaan terhadap **Perubahan Nyata** Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan di Kota Bandung.

11. Untuk Mengetahui **Aliran Informasi** pada Kegiatan Pembinaan terhadap **Efektivitas Program** Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan di Kota Bandung.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil dari skripsi ini diharapkan dapat berguna untuk membantu mengembangkan ilmu pengetahuan tentang komunikasi secara umum, terutama mengenai komunikasi organisasi.

##### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Peneliti berharap agar skripsi ini secara teoritis dapat menjadi referensi dalam ilmu pengetahuan pada bidang ilmu komunikasi dan secara khusus, pada bidang ilmu pengetahuan mengenai komunikasi organisasi.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Peneliti berharap dapat memberikan suatu bentuk masukan yang dapat digunakan untuk menjadi bahan kajian ilmu. Kegunaan praktis yang ingin diuraikan peneliti dalam penelitian berikut terbagi menjadi tiga kegunaan praktis.

#### **1. Kegunaan Bagi Peneliti**

Peneliti dapat menggunakan ilmu pengetahuan serta teori-teori yang dipelajari selama perkuliahan untuk melakukan penelitian dan dapat membuat sebuah bentuk pemikiran tentang Pengaruh Aliran Informasi pada Kegiatan Pembinaan terhadap Efektivitas Program Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan di Kota Bandung.

## **2. Kegunaan Bagi Akademik**

Kegunaan penelitian ini secara akademik dapat digunakan oleh mahasiswa Universitas di Indonesia, terutama bagi mahasiswa dengan Program Studi Ilmu Komunikasi dan Ilmu lain jika penelitian ini memiliki relevansi dalam penelitian yang ingin dilakukan, juga sebagai studi literatur khususnya untuk mahasiswa yang melakukan penelitian yang sama.

## **3. Kegunaan Bagi DP3A Kota Bandung**

Kegunaan Praktis Penelitian ini untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung adalah sebagai bentuk bahan referensi tentang komunikasi organisasi pada pelaksanaan kegiatan pembinaan dengan mitra kerja organisasi, khususnya mengenai Pengaruh Aliran Informasi pada Kegiatan Pembinaan terhadap Efektivitas Program Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan di Kota Bandung.